

Paradigma Baru Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Oleh : Hamdani

(Dosen Ekonomi Syariah, IAI Ngawi)

Pendahuluan

Persoalan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi menjadi problem setiap masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia. Forum ekonomi tingkat dunia G-20 dan World Bank mencatat pada tahun 2018 bahwa Masyarakat miskin di dunia masih mencapai 40 % dari jumlah Masyarakat dunia. Indonesia yang tergabung dalam Masyarakat berkembang pertumbuhan ekonomi hanya tercatat 5,02 % dari jumlah PDB penduduk Indonesia pada tahun 2019. Artinya, Indonesia dikategorikan Masyarakat yang belum sejahtera oleh World Bank, karena jumlah penduduk miskin Indonesia masih diatas angka 10%. Untuk memecahkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, perlu adanya langkah konkrit dan berkelanjutan dalam mensejahterakan rakyatnya. Olaf Corry menegaskan untuk menjadikan Masyarakat sejahtera perlu melibatkan tiga stakeholder yang saling bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, kebijakan pemerintah dalam jaminan social. *Kedua*, pelibatan swasta dalam pertumbuhan ekonomi industry, *ketiga*, pelibatan organisasi nirlaba atau voluntir social yang bertujuan membantu masyarakat dalam pembinaan sector ekonomi.

Sejak kelahiran Islam sebagai norma, petunjuk seluruh alam semesta telah membeirkan persuasive kepada semua pemeluknya termasuk dalam hal ekonomi dan akuntansi. Segala transaksi dan laporan keuangan sudah dianjurkan islam agar manusia memcatat dengan baik dan adil.¹ Hal ini difirmal dalam Al-quran” surat Al-Baqarah ayat 282”

¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, perspektiof, metodolofis dan teori*, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, hal 21

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengatakannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengilakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.²

Sementara, As-syatibi, tokoh ekonomi islam yang populer dengan maqasit syariah menjelaskan untuk mencapai sejahtera social diperlukan lima aspek dalam kehidupan manusia termasuk manusia Indonesia. Memelihara akal manusia, Jiwa yang shaleh, Agama, Keturunan dan harta.³ Kelima fase pokok tersebut harus dimiliki oleh setiap warga (umat manusia) jika ingin disebut merdeka dan sejahtera secara ekonomi. Dengan demikian, As-syatibi dalam pandangannya menekankan pentingnya sumber daya manusia (Jiwa shaleh) dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat, pemeliharaan harta. Selain Sum, hal ber daya manusia, juga pentingnya education dan agama sebagai ujung tombak meningkatkan taraf hidup penduduk dan keadilan ekonomi.

² QS Al-baqarah (2) 278

³ Syatibi, Al-muwafaqat Fi Ushul Syariah jilid 2 bairut: Dar Al-Kutub) hal 3 , dalam Mahlani ekonomi pembangunan Islam, cet. Jogjakarta, UIN Suka, 2016

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Paradigma dapat didefinisikan sebagai cara pandang seseorang mengenai suatu pokok permasalahan yang bersifat fundamental untuk memahami suatu ilmu maupun keyakinan dasar yang menuntun seorang untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Capra(1991) menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya, dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realita sejarah sains.⁴ Sedangkan Kuhn (1962) dalam menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkat konsep, nilai, teknik dll yang digunakan secara bersamadalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah bersertasolusinya.⁵

Paradigma menurut Bhaskar (1989) paradigma diartikan sebagai : *a set of assumptions*, b) *belief concerning* and c) *accepted assume to be true*” atau dapat diterjemahkan sebagai seperangkat asumsi yang dianggap benar apabila melakukan suatu pengamatan supaya dapat dipahami dan dipercaya dan asumsi tersebut dapat diterima. Dengan kata lain bahwa paradigma adalah sebuah bingkai yang hanya perlu diamati tanpa dibuktikan karena masyarakat para pendukungnya telah mempercayainya. Hanya tinggal kita saja yang perlu untuk mencermati dari berbagai macam paradigma yang ada.

Paradigma tersebut secara filosofis telah memenuhi kriteria dan ciri-ciri penelitian ilmiah, baik ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Dengan landasan kebenaran, penelitian ini mengakui bahwa apa yang diteliti merupakan kondisi dan realitas sosial yang berada pada status *quo* dan hal ini merupakan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu hakikat penelitian adalah menemukan realitas sosial yang sama-sama dilalui kebenarannya, dan kebenaran yang diperoleh dapat berupa kebenaran empirik sensual, kebenaran empirik logik, kebenaran empirik etik insaniyah dan bersifat final. Kebenaran ini bersifat laten, maupun manifest dalam bentuk temuan hasil penelitian. Inti merupakan ontologinya. Cara untuk memperoleh kebenaran tersebut tidak hanya mengandalkan kemampuan akal dan budi manusia, akan tetapi selalu melibatkan

⁴ Umar Chapra, *The Islamic Vision, of Development*,(bairut: 2000), hal 54

petunjuk (wahyu) untuk subyektivitas peneliti. Jadi perpaduan antara keduanya dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran empirik transendental yang dinamakan epistemologi. Sedangkan aksiologinya adalah aplikasi temuan yang didasarkan pada kondisi dan situasi pada waktu dilapangan berdasarkan logika dan subyektivitas pribadi.

Macam-Macam Paradiqma

1. Paradiqma Normatif-obyektif

Menurut (Resenau, 1992), kausalitas dan prediksi dapat dicapai dengan baik jika penelitian dilakukan secara obyektif. Ini berarti bahwa ilmu pengetahuan modern bersih dari nilai dan perasaan subyektif manusia, karena nilai dan perasaan. Semisal modernisme, dapat membuat penelitian dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan menjadi bias. Sebaliknya, Postmodernisme tidak sependapat dengan pandangan ini. Pengikut postmodernisme setuju bahwa nilai, pertanyaan-pertanyaan normatif, perasaan dan emosi, semuanya merupakan bagian dari produk intelektual manusia. Adalah suatu hal yang tidak perlu meniadakan unsur-unsur ini dalam proses produksi ilmu pengetahuan.⁶

Selanjutnya, paradiqma normatif, perasaan dan emosi merupakan bagian esensial yang digunakan, dalam konteks metode, untuk menafsirkan dan mendekonstruksi realitas sosial yang kompleks. Secara implisit berarti tidak ada aturan metode yang formal dan kaku sebagaimana dikemukakan oleh modernisme. Apabila dilihat dari orientasi postmodernisme adalah pada metode-metode yang dapat diaplikasikan pada ruang lingkup yang luas dari sebuah fenomena, berfokus pada apa yang ada pada posisi marginal. Mengungkap keunikan, berkonsentrasi pada sesuatu yang misterius.

Memahami realitas sosial secara independen eksis dari manusia sebagai makhluk yang kreatif, maka modernisme mencoba menghasilkan pengetahuan berdasarkan hipotesis epistemologis dan lawan-hipotesis secara objektif, yaitu pendekatan hipotesis deduktif.⁷ Pendekatannya tidak hanya sebagai metode ilmiah.⁸ Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa postmodernisme “mengorganisasikan ilmu pengetahuan di sekitar personal, intuitif, dan epistemologis. Oleh karena itu ilmu pengetahuan, menurut postmodernisme, bersifat subyektif. Implikasi dari hal ini adalah bahwa tidak ada apa yang dinamakan ilmu yang bebas dari nilai.

⁵ bukunya *The Structure of Scientific Revolution*, tt

⁶ Faturahman Jamil, *Filsafat hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, hal 64

⁷ Lutfil Hakim, *Pergeseran Paradiqma, Maqasid Syariah*, Jurnal Al-Manhaj, Stis Syarif Abdurahman Pontianak, no10 volume, 1 Juni 2016

⁸ Ibid, *Lutfil hakim*, hal 53

2. Paradigma Interpretif

Pendekatan dalam bingkai positivisme sangat bertolak belakang dengan pendekatan dalam bingkai interpretif. Dalam pendekatan interpretif telah dipasang rambu-rambu bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu alam tidak bisa diambil dan dimasukkan begitu saja ke dalam ilmu-ilmu sosial. Karakteristik ilmu sosial sangat berbeda dengan karakteristik ilmu alam, sehingga bagi paham interpretif, sumber dari perilaku sosial dalam tataran ontologi dianggap tidak terletak di luar aktor.⁹ Hal itu berarti bahwa realitas sosial sebenarnya secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu-individu. Setiap individu memiliki potensi untuk memberi makna apa yang dilakukan. Realitas sosial adalah produk dari interaksi antar individu yang sangat sarat makna.

Apabila ditinjau dari prinsip dasar yang dikembangkan oleh interpretif, ada tiga prinsip dasar dalam membaca fenomena, yaitu:

1. Individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada dilingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut pada dirinya.
2. Makna tersebut diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain, dan
3. Makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang berkaitan dengan hal-hal lain yang dijumpainya.

Ketiga prinsip dasar tersebut pertama-tama disusun oleh asumsi bahwa setiap individu bisa melihat dirinya sendiri sebagaimana ia melihat orang lain. Individu juga tidak pasif, memiliki kemampuan untuk membaca situasi yang melingkupi hidupnya. Pola interaksi yang dikembangkan oleh individu dalam aktivitas sosialnya terutama ditentukan oleh bagaimana individu tersebut menafsirkan situasi yang melingkupi hidupnya.¹⁰

Dengan demikian perhatian teori interaksi simbolik banyak difokuskan pada aspek-aspek interaksi sosial. Baik yang memelihara stabilitas maupun yang mendorong perubahan individu seharusnya melihat dirinya sendiri dan menafsirkan situasi yang

⁹ Kasmana, *Paradigma Al-quran, Model Analisis tafsir Maqosidi*, Jurnal Afkaruna, studi islam, nomor 3, vol 2, 2015, hal 67

¹⁰ Hasimsyah, *Paradigma-paradigma filsafat*, Aksara: Jogjakarta, 2017, hal 65

melingkupi hidupnya. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar tersebut, interpretif menawarkan metodologi yang lebih menekankan pada pemahaman makna dengan melakukan empati terhadap sesuatu aktivitas dan menempatkan suatu aktivitas yang ada dalam masyarakat. Berbagai macam makna bisa terurai dari situasi jalinan interaksi. Konsekuensinya kemudian adalah bahwa suatu aktivitas bisa melahirkan berbagai macam analisis.

3. Paradigma Kritik

Dalam ilmu sosial banyak ahli karakter paradigma penelitian Burrell dan Morgan (1994:3) mengategorikan ilmu sosial dalam empat paradigma, yaitu *paradigma fungsionalis*, *interpretatif*, *radikal humanis*, dan *radikal strukturalis*. Dari keempat paradigma ini, masing-masing mempunyai konsekuensi yang berbeda dalam penelaahan penelitian. Dapat dipastikan bahwa setiap paradigma akan mempunyai penekanan dalam membahas/meneliti suatu masalah/fenomena yang akan diriset. Keempat paradigma ini bersumber pada mekanisme asumsi yang bersumber pada dua dimensi ekstrem, yaitu dimensi subyektif dan obyektif.

Menurut Triuwono (1998:4), paradigma kritikal merupakan paradigma yang menganggap bahwa penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengekspos hubungan nyata (*real relations*) yang dibawah “permukaan” mengungkap mitos dan ilusi, dan menekankan pada usaha menghilangkan kepercayaan dan ide-ide yang salah, menekankan pada pembebasan dan pemberdayaan. Didisari oleh anggapan hakikat diri manusia yang dinamis, manusia sebagai pencipta destinasi hidupnya, manusia yang ditekan, dieksploitasi, dibatasi, dicuci otak, diarahkan, dikondisikan, dan ditutupi dalam upaya mengaktualisasikan potensinya.

Konsekuensi dari anggapan ini adalah bahwa paradigma ini memandang realitas sosial sebagai realitas yang sangat kompleks (yang tampak dan nyata), penuh dengan kontradiksi, konflik, tekanan, dan eksploitasi, sehingga tidak mengherankan bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat yang digunakan untuk membebaskan dan memberdayakan manusia juga menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas dari nilai (*not value free*).

B. Akuntansi Syariah sebuah alternative

Berbicara akuntansi Syariah tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Ekonomi konvensional yang bercorak Kapitalisme-Liberalisme global. Ekonomi Kapitalisme lebih mengedepankan keuntungan-laba, dari pada keadilan ekonomi. Krisis ekonomi

yang melanda dunia belakangan ini, lebih banyak disebabkan adanya kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendapatan di masyarakat baik di Indonesia maupun secara global. Kekuatan Kapitalisme global mempengaruhi, mengkooptasi dan eksploitasi kekuatan dunia yang mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi marginal, miskin dan krisis sumber daya alam.

Akuntansi konvensional tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kapitalisme global, yang membentuk watak manusia dalam pelaporan ekonomi, menjadi samar dan penuh tipu muslihat. Pelaporan akuntansi harus sesuai dengan aturan ekonomi kapitalisme, dimana perusahaan atau perbankan harus untung-laba tidak boleh rugi, karena akuntansi harus mengikuti kapitalisme dan tidak dilaporkan secara transparan dan aturan tauhid ilahiyah.¹¹

Dekade terakhir ini, keberadaan kapitalisme global semakin kuat dan nyata adanya, hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi masyarakat antara kaya dan miskin semakin nyata. Prilaku hidonisme, pasar bebas telah menyebabkan banyak Masyarakat terjatuh kepada krisis keuangan dan ekonomi, belum lagi kerusakan alam, sumber-sumber ekonomi dan fasilitas umum menjadi sasaran kapitalisme.¹² Sementara disisi lain, Islam turun sebagai bentuk pembebasan atar prilaku manusia baik didunia teori maupun praktek. Tokoh islam, seperti Ismail Faruqi, Fazlur Rahman, telah banyak menyingung soal islamisasi ilmu pengetahuan, bahkan membangun keragka-pradigma ilmu pengetahuan berdasarkan tauhid ilahi.

Al-quran sebagai sumber ajaran islam cukup relevan dengan dunia global yang banyak menyebabkan krisis ekonomi, dan krris kemanusiaan, sehingga islamisasi pengetahuan menjadi alternative metode dalam menyelesaikan konflik-krisis ekonomi. Semisal, ekonomi Islam, Akuntansi Islam, psikologi Islam dan perbankan Islam. Sistem Islam ini diharapkan menjadi solusi atau motode alternative dalam berbagai persoalan global yang banyak menyeret kesengsaraan manusia.

Sehungan dengan hal tersebut, Triyuwono menyebutkan, Akuntansi islam secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas semu beserta jaringan kuasanya, untuk kemudian memberikan realitas alternative dengan seperangkat jaringan kuasa Ilahi, yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Dengan cara demikian,

¹¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, perspektif, metodologis dan teori*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006, hal 22

¹² Dedi Mulawarman, *Masa Depan Ekonomi Islam, dari paradigma menuju metodologi*, Jurnal Imanensi,

realitas alternative diharapkan akan dapat membangkitkan kesadaran diri (self concsciousnes) secara penuh akan kepatuhan dan ketundukan seseorang pada kuasa Ilahi. Dengan kata lain, pelaporan akuntansi tidak hanya mengandalkan kapitalisme, tetapi juga harus mengandung nilai-nilai tauhid-islam dalam setiap pelaporan keuangan.¹³

Hakekat Akuntansi Syariah

Secara umum akuntansi syariah menggunakan paradigma normative yakni paradikma dengan konsep umum, abstrak, baru kemudian diturunkan menjadi konsep yang lebih khusus dan praktis bahkan pragmatis-aplikatif. Paradiqma akuntansi syariah bermula dari menetapkan tujuan, kemudian melahirkan teori dan membuat tehknis praktis akuntansi secara syariah.¹⁴

Akuntansi syariah sebagai instrument pelaporan akuntansi secara umum namun bertujuan agar pelaporan akuntansi tidak lagi terpaku kepada kapitalisme, tetapi membebaskan manusia dari jerat pelaporan yang selama ini dianggap semu dan konvensional. Akuntansi Syariah harus memasukan prinsip-prinsip islam dalam spirit penulisan laporan semisal Laporan Rugi Laba, Laporan Neraca, sehingga tercipta realitas tauhid, yakni realitas yang sarat dengan jarring kuasa tuhan untuk mendorong manusia terbebas dari penipuan pelaporan akuntansi.

Harahap (1997), Akuntansi Syariah harus mengungkapkan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan dari transaksi -transaksi yang dicatat untuk menjadi laporan akuntansi oleh sebuah perusahaan. Pelaporan dengan rasa terbuka ini menjadikan manusia terbebas dari beban ekonomi konvensional yang menuntut adanya Laba, menuju pelaporan yang berorientasi tauhid, memasukan zakat perusahaan, sehingga menjadi nilai (value approach) dalam kehidupan manusia.

Nilai tambah dalam Akuntansi Syariah sangat dimungkinkan terjadi, mengingat setiap perusahaan harus mengeluarkan dana CSR (social respond cibility) untuk kegiatan social, sehingga peran akuntansi syariah sangat penting untuk keadilan ekonomi. Jika hal ini bisa dilaksanakan, maka transparansi, akuntabilitas dan

Nomor, 3, vol 4,2013

¹³ Ibid, *Iwan Triuwono*, hal 27

¹⁴ Triuwono, *Akuntansi Syariah*, rajawali Pres, Jakarta, 2016, hal 27

keterbukaan pelaporan semakin baik, dan mendekati rasa keadilan social dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, Pelaporan Akuntansi Syariah yang awalnya berupa Paradigma kemudian diturunkan menjadi sebuah konsep (*Gagasan*), serta penggunaan metodologi yang tepat, sehingga melahirkan sebuah kerangka praktis (*aplikatif*) dan memprakarsai kelahiran Akuntansi Syariah sebagai sebuah Ilmu Pengetahuan. Akuntansi Syariah dipraktikkan dalam dunia nyata.¹⁵

Maqasid Syariah

Musa As-syatibi adalah tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqasid As-syariah yang menyatakan bahwa maqasid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan usul fiqh karena teori maqasid cocok dengan criteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas.¹⁶ Sebagaimana dalam kajian tentang Akuntansi Syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan keadilan social kepada masyarakat.

Maqasid As-syariah berfungsi untuk melakukan dua hal yakni tahsil yaitu menggunakan manfaat (*maslahat*) dan kedua *Ibqa'* (mencegah kerusakan) atau *mudharat* dalam social masyarakat. Maslahat dalam kajian akuntansi Syariah adalah transparansi, akuntabel dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi, hutang piutang dalam masyarakat, dimana fungsinya adalah terciptanya keadilan ekonomi dan pembangunan dan menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan.¹⁷

Maqasid syariah terhadap kajian akuntansi syariah dibagi dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan, transparansi, keadilan pelaporan akuntansi yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

1. Hifd Addin (menjaga agama)

Dalam kaitannya dengan akuntansi syariah, *hifz Addin* adalah laporan Akuntansi syariah harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga masyarakat dalam menganut agama masing-masing. Agama harus menjadi sumber dan petunjuk bagi warga masyarakat dalam menjalani hidup didunia. Karena tujuan akuntansi adalah membuat laporan berdasarkan transparansi, keadilan dalam menjalani agama dan tidak

¹⁵ Ibid, hal 29

¹⁶ As-syatibi, *Al-muwafaqat fi usul asy-Syariah*, (Libanon, 2004), hal 54

¹⁷ Ibid, hal 60

merasa tertipu dengan laporan yang tergantung dengan kapitalisme ekonomi.

2. Hifz Annfis (*Menjaga Jiwa*)

Akuntansi harus memberikan kemaslahatan dan kedamaian bagi warga masyarakat dan penduduk bumi. Kedamaian, saling gotong royong, menghindari konflik social, kekeluargaan dan hidup bahagia adalah bagian dari tujuan akuntansi. As-Syatibi menjelaskan menjaga jiwa adalah setiap individu yang hidup di sebuah pelapangan Akuntansi harus terjamin dan tidak terancam jiwanya dalam menjalani hidup, baik secara ekonomi, social dan berpolitik. Menjaga jiwa adalah memberikan jaminan social kepada warga masyarakat, seperti BPJS, melindungi pendidikan, memberikan beasiswa kepada orang miskin, memberikan sembako kepada orang jompo.

3. Hiz Al-Amal (*menjaga harta*)

Laporan Akuntansi harus memberikan perlindungan kepada warga Masyarakat, baik jiwa, harta dan martabatnya. Masyarakat harus hadir melindungi dan memberikan keamanan terhadap pengelolaan ekonomi masyarakat, termasuk pihak swasta yang berinvestasi di sebuah Masyarakat. Perlindungan ekonomi ini menurut As-Syatibi sangat luas, termasuk melindungi setiap warga Masyarakat yang hendak melakukan investasi, berbisnis, wirausaha dan mengelola ekonomi, sehingga dengan keamanan yang diberikan Masyarakat, masyarakat merasakan kehadiran Masyarakat.

4. Hifz Nasl (*menjaga Keturunan*)

Negara harus menjamin terhadap kehidupan warganya termasuk keturunanra dan bayi yang baru lahir dengan cara memberikan perlindungan terhadap ibu hamil dan bayi stunting. Masyarakat juga memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan dan anak busung lapar, anak-anak yang terjangkit narkoba, sehingga lahir konsep keluarga berencana. Masyarakat juga hadir memberikan perlindungan dengan konsep kota ramah anak, kota wisata anak dan pendidikan anak-anak sejak usia dini. Artinya Masyarakat menjaga keturunan demi generasi masa depan.

5. Hifz Al-Aql (*Menjaga Akal*)

Perlindungan dan peningkatan sumber daya manusia wajib dilakukan oleh Masyarakat sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi dan visi yang kuat dalam meningkatkan kemampuan setiap warga Masyarakat, baik dalam pendidikan, vokasi dan keterampilan. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pendidikan karakter, life skill, hart skill, wajib diterapkan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam di suatu Masyarakat. Menjaga akal juga Masyarakat hadir dalam memberikan beasiswa

pendidikan, dan perlindungan pendidikan kepada pihak swasta dan masyarakat.

Berbeda dengan As-Syatibi, Umar Chapra, seorang tokoh ekonomi Islam mengatakan, bahwa untuk mencapai keadilan dan pemerataan, maka pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi sebuah Masyarakat dengan indikator memberikan perlindungan dan menjamin hidup setiap warga Masyarakat. Kebijakan pembangunan harus menjamin kelangsungan hidup manusia, segala sesuatu yang dapat melindungi jiwa harus dijaga, dan segala sesuatu yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia harus dibasmi.

Oleh karenanya, perlu verifikasi kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, tidak hanya demi tercapainya peningkatan dan kesinambungan kesejahteraan. Tapi juga agar mereka dapat memainkan peran utamanya sebagai *Khalifah fil ardh*, untuk memperkuat kehidupan manusia. setidaknya ada 14 aspek kehidupan perlindungan jiwa yang harus dipenuhi.¹⁸

1. *Self respect, human brotherhood and social equity.*

Demi memperkuat kehidupan manusia, maka hal penting dilakukan adalah penegakan harga diri, penghormatan diri (*self respect*), persaudaraan, dan persamaan sosial (*social equity*), sebagai wakil Allah di muka bumi, maka manusia mempunyai rasa persaudaraan yang tinggi. Mereka harus hidup berdampingan secara damai, saling menghormati serta saling memperhatikan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

2. *Keadilan (Justice)*

Kebutuhan dari manusia adalah keadilan sosial. Penegakan keadilan menjadi misi utama dari setiap lahirnya nabi. Ketidakadilan akan menimbulkan kerugian dan cemburu sosial sehingga timbul kesenjangan ekonomi dan sosial. Ketidakmerataan (*inequity*) merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, sehingga Islam melarang perbuatan curang dan ketidakadilan.¹⁹

3. *Spiritual and Moral Uplift*

Peningkatan spiritual dan moral menjadi kebutuhan ketiga dari manusia demi mencapai kesejahteraan sosial dan kepuasan spiritual. Akhlak yang tinggi menjadi contoh dan pokok dalam sisi kehidupan manusia, dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

¹⁸ M Umar Chapra, *The Islamic Vision Of Development*, (Jeddah, IDB, 2008) hal 8

¹⁹ Ibid, hal 10

membangun hubungan social yang harmonis, manusia membutuhkan akhlak.

4. *Security of life*

Islam beserta nilai-nilai yang dikandungnya menekankan kebutuhan keempat dari manusia, yaitu jaminan hidup (*security of life*), kekayaan (*property*) dan kehormatan (*honour*). Islam sangat melarang segala bentuk tindakan kekerasan dan anarkisme dalam bentuk apapun. Keselamatan dan keamanan dalam diri manusia sangat berarti, sehingga setiap manusia berhak mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman.

5. *Family and social solidarity*

Untuk menciptakan keluarga yang saling mencintai, berkasih sayang dan menyenangkan antara satu dengan yang lain dalam keluarga, maka islam menganjurkan bahwa persaudaran adalah hal penting, apalagi menjaga keluarga dan jiwa dari siksaan api neraka.

6.Fredom

Kebebasan dalam kehidupan adalah sesuatu yang sulit dihindari dari manusia. kebebasan adalah syarat utama dalam pengembangan kepribadian manusia. Tanpa kebebasan dan manusia tidak akan dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. Dan akhirnya akan berdampak pada pengemangan manusia dan kesejahteraannya. Sebagai *khalifah* dimuka bumi, manusia diberikan kebebasan penuh oleh Allah Swt dengan melakukann kreatifitasn dan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia mempunyai tujuan mulia yakni pengelola bumi beserta isinya untuk kesejahteraan umat.

7.Education

Kebutuhan manusia selanjutnya adalah penddidikan, pengayaan intelektual melalui kualitas poendidikan yang baik, pendidikan harus berperan dalam 3 hal. Pendidikan harus mencerahkan seluruh umat manusia dan meninggikan nilai-nilai penguatan visi dan misi manusia. 2. Pendidikan harus menyadarkan manusia untuk kepentingan bertaqwa dan mengabdikan kepada sang khaliq-nya. Atas dasar itu manusia akan mendapatkan derajat -kemuliaan disisi Tuhan. 3. Pendidikan harus mencerdaskan anak bangsa, menghilangkan kebodokhan dan ketertindasan, dengan pendidikan manusia menjadi setara dan tidak ada penakanan atas orang-orang bodoh.

8. *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang baik adalah kebutuhan penting

bagi manusia. tanpa adanya tata kelola yang baik, stabilitas politik dan kepedulian social, maka tata social masyarakat akan menjadi tidak stabil. Tindakan criminal dan sewenang-wenang menjadi tontonan yang sering diperlihatkan oleh pejabat pemerintah dan politisi. Sehingga tindakan yang bersih dan pengelolaan yang baik masih menjadi cita-cita dan impian banyak orang. Oleh karena itu, tindakan good Governance harus menjadi misi setiap manusia dalam mengelola kekayaan Indonesia.

9. Removal of poverty and need fulfillment

Kemiskinan akan menyebabkan pelemahan kapasitas dan ketergantungan kepada orang lain. Kemiskinan juga akan menyebabkan orang menjadi fakir dan lemah iman, karena itu islam melarang umatnya menjadi miskin. Islam menganjurkan umat untuk bekerja keras dan berbisnis dalam rangka meningkatkan omset -kesejahteraan keluarga.

10. Employment and Self -Employment Opportunitess

Islam sangat melarang perilaku meminta-minta dan pemalas, karena itu orang yang pemalas dalam Al-quran disebut orang yang rugi. Rugi dalam urusan dunia dan rugi dalam urusan akherat. Manusia dianjurkan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya dan berkewajiban dalam melaksanakan kebutuhan social beserta keluarganya.²⁰

11. Equitable distribution Income

Al-quran menganjurkan agar kekayaan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan sampai kekayaan hanya dinikmati oleh orang-orang yang tertentu saja, karena itu islam harus didistribusikan kepada orang lain. Keadiklan distribusi kekayaan inilah yang mengantarkan kesejahteraan social demi mewujudkan dan menguatkan keimanan. Pemerataan pendapatan harus berputar kepada mereka yang miskin, demi terwujudnya kesejahteraan.

12. Marriage and stable family life,

Laki-laki dan perempuan membutuhkan keluarga melalui pernikahan yang dimaksudkan memenuhi kebutuhan social/ dan pasangan hidup mereka untuk menyenangkan dan menentramkan masyarakat. berKeluarga adalah sunah yang dianjurkan untuk mengangkat derajat dan melestarikan tradisi islam yang mulia dan

²⁰ M Umar Chapra,

menghindarkan dari perbuatan zina.

13. Family And social Solidarity

Untuk menciptakan keluarga yang saling mencintai-saling menghargai berkasih sayang dan menyenangkan antara suami dan isteri, maka Al-quran memberikan hak yang sama pada perempuan terhadap laki-laki.

14. Minimization of Crime and mental Peace dan Happiness

Semua pemenuhan kebutuhan manusia diatas, demi memperkuat kehidupan manusia harus dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat bermasyarakat tanpa tingkat kriminalitas yang tinggi. Tingginya kriminalitas akan mengganggu pembangunan manusia dan kesejahteraan.

Maqasid Syariah menurut Pandangan Al-Ghazali

Sementara Al-Ghazali mengatakan, manusia harus bebas dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan tidak terbelenggu dengan ekonomi kapitalisme. Al-Ghazali membagi 3 bagian: Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling terikat antara satu dengan yang sehingga disebut makhluk social. Karena itu, Al-Ghazali membagi kebutuhan manusia menjadi tiga (yaitu) *daruriyat, hajiyat, tahsiniyat*.²⁰

1. Daruriyat adalah landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan diakhirat yang mencakup pemeliharaan kelima unsure pokok kehidupan agama. Daruriyat adalah kebutuhan pokok yang harus ada pada diri dalam manusia yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan diakhirat.
2. Hajiyat (kebutuhan sekunder) kebutuhan sekunder apabila tidak terwujud tidak akan mengancam keselamatan manusia, namun manusia akan mengalami kesulitan dan syariat islam menghilangkan segala kesulitan itu.⁷⁰ Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) adalah salah satu cara untuk mengakomodir kebutuhan sekunder ini. Islam mensyariatkan beberapa *rukhsah* bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah swt.

²⁰ Ghazali, Abdul Hamid, *Man Is The basic of the Islamic strategy for economic development*, Jeddah, 1994

⁷⁰ Ibid, Al-Ghazali,

3. **Tahsiniyat** adalah kebutuhan apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok fungsi kehidupan ini. Kebutuhan ini merupakan pelengkap bagi kebutuhan yang lain, untuk menyempurnakan kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Paradigma Akuntansi Syariah dalam perspektif *maqashid syari'ah* sebagai sebuah ilmu social yang dilihat dari sudut fiqih social, seperti memberikan keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Esensi dari hukum Islam adalah merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat

demokratis. Jika selama realitas umat islam belum mampu secara kuat mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, itulah sunatullah.

Konteks wacana *tafsir maqasidi* adalah sanga relevan dan signifikan karena adanya kesamaan semangat mendasarkan pada nilai dan prinsip dasar Islam, khususnya al-Qur'an dalam upaya rekonstruksi pemikiran keislaman. Al-quran harus mampu menjawab persoalan modern-kontemporer seperti Akuntansi syariah dan dapat aplikasikan untuk menjawab masalah-masalah social.

Daftar Pustaka

- As-Syatibi *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Libanon dar Al-Kutub, 2004
- Dedi Mulawarman, *Masa Depan Ekonomi Islam, dari paradigma menuju metodologi*, Jurnal Imanensi, Nomor, 3, vol 4,2013
- Francis Fukuyama, *State Baiding*, 2005, Governance and word order in the Twenty.
- Ghazali, Abdul Hamid, *Man Is The basic of the Islamic strategy for economic development*, Jeddah,1994
- Palguna, *Welfare State dan Globalisasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2019
- Mustafa Anas Zarqa, *islamic Economic : an Approac to Human welfare*, (Salagor Malaysia, 1989)
- Kasmana, *Paradiqma Al-quran, Model Analisis tafsir Maqosidi*, Jurnal Afkaruna, studi

islam, nomor 3, vol 2,2015,

Hasimsyah, *Paradiqma-paradiqma filsafat*, Jogjakarta: Aksara, 2017, hal 65

Nawawi, *pembangunan ekonomi islam*, (Surabaya UIN pres, 2013)

Sadeq, *Economic development in islam*, Jurnal Of Islamic Economic, Vol, I tahun 1987

Umar Chapra, *The Islamic Vision Of Develoment*, (Jeddah, IDB,2008) hal 8

Sri Edi Swasono, *Pradigma baru ilmu ekonomi*, Jakarta: (UIN Jakarta Pres, 2012)

Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai sebuah Karangka*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2012

Triyuwono, *Akuntansi Syariah, Perspektif, Metodologi dan teori*, Jakarta : rajawali Pres, Jakarta, 2016,

Tom G Palmer, *After the Welfare State, student for liberty and atlas network*. (Arlington Washington,2012

Yusuf Qordhawi, *Fiqh maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran tektualis dalam aliran liberal*, Jakarta, Al-Kausar, 2006,